

LAPORAN

KINERJA



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

2021



Kata Pengantar

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, Februari 2022

Kepala Dinas,

Drs. Agus Sulistiyana, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640321 198602 1006



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

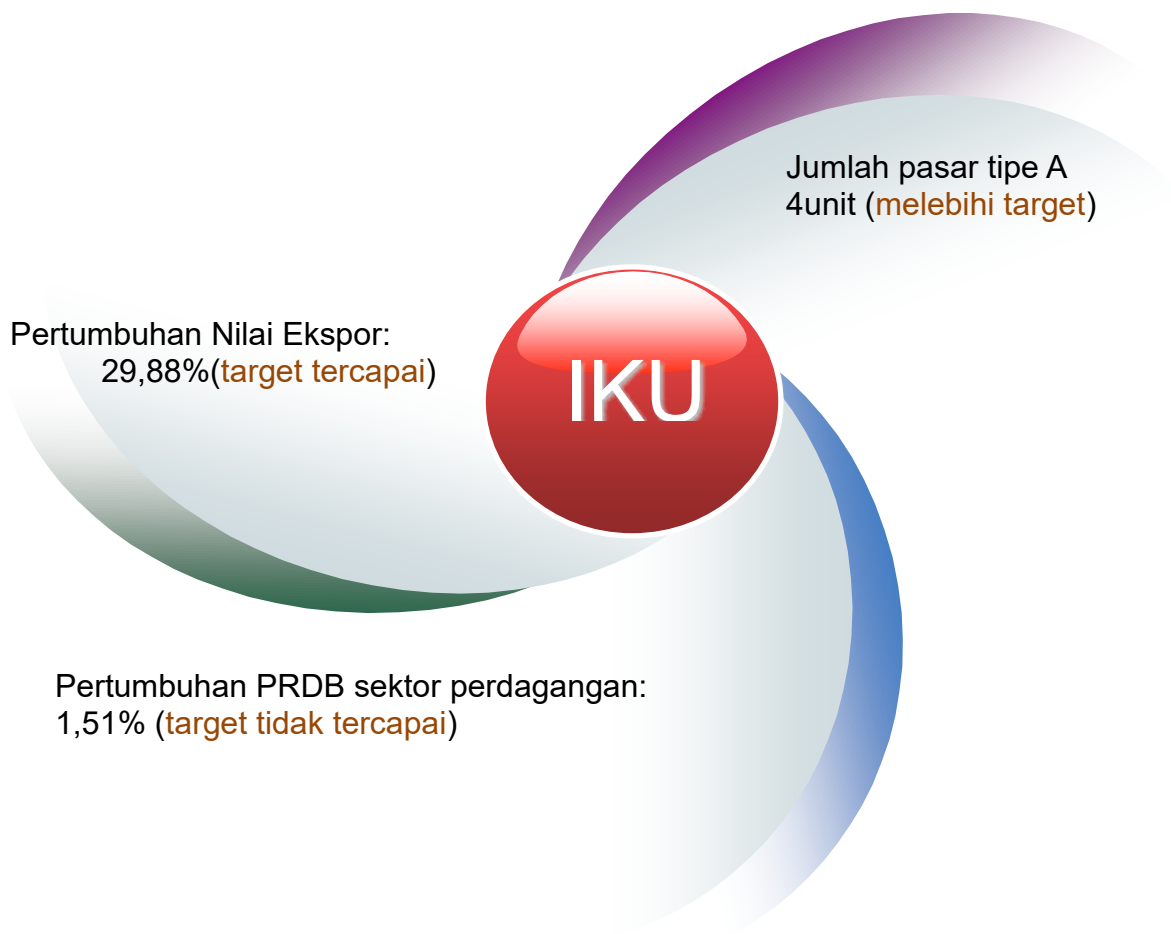
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 IKU:

No.	IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7,25	29,88	Melebihi target
2	Jumlah pasar tipe A	4	4	Melebihi target
3	Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	6,95	1,51	Target tidak tercapai

Secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul belum dapat memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Faktor paling dominan adalah adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan

terjadinya perlambatan perekonomian dunia termasuk Indonesia dan berimbas pada daerah-daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bantul

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sistematika Laporan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	22
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 Akuntabilitas Anggaran	54
3.4 Efisiensi Sumber Daya	56
3.5 Kinerja Lain-lain	57
BAB IV. PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 <i>The Next Steps</i>	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2021	11
Tabel 1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis	13
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan	18
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	21
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	22
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2016-2021	25
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2021	25
Tabel 2.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	26
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021	28
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2021	30
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2021	31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2021	32
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	35
Tabel 3.7	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36

Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	37
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	38
Tabel 3.10	Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2021	41
Tabel 3.11	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2021	41
Tabel 3.12	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2015-2021	41
Tabel 3.13	Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2021	45
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	46
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang	48
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	49
Tabel 3.17	Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2021 Di Kabupaten Bantul	50
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2015-2021	52
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	53
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	54
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	55
Tabel 3.22	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	11
Gambar 1.2	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1.3	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.4	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 1.5	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia	12
Gambar 3.1	Planning Process	27
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	33
Gambar 3.3	<i>Struktur Ekonomi Bantul</i>	34
Gambar 3.4	PDRB sektor	35
Gambar 3.5	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36
Gambar 3.6	Pengendalian BBM	38
Gambar 3.8	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2015-2021	49
Gambar 3.9	Perkembangan Ekspor 2015-2021	52



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 8 program 18 kegiatan pada tahun 2021 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Perdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

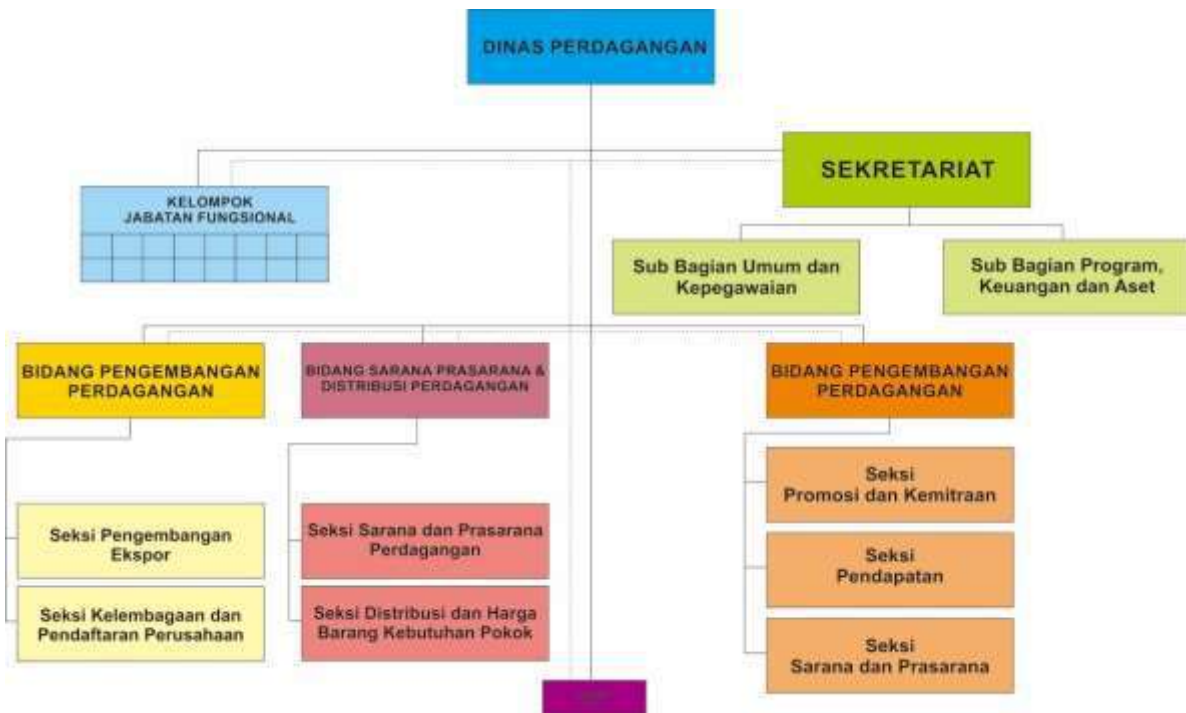
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
 - 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
4. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
5. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 5.2 Seksi Pendapatan
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
6. UPT

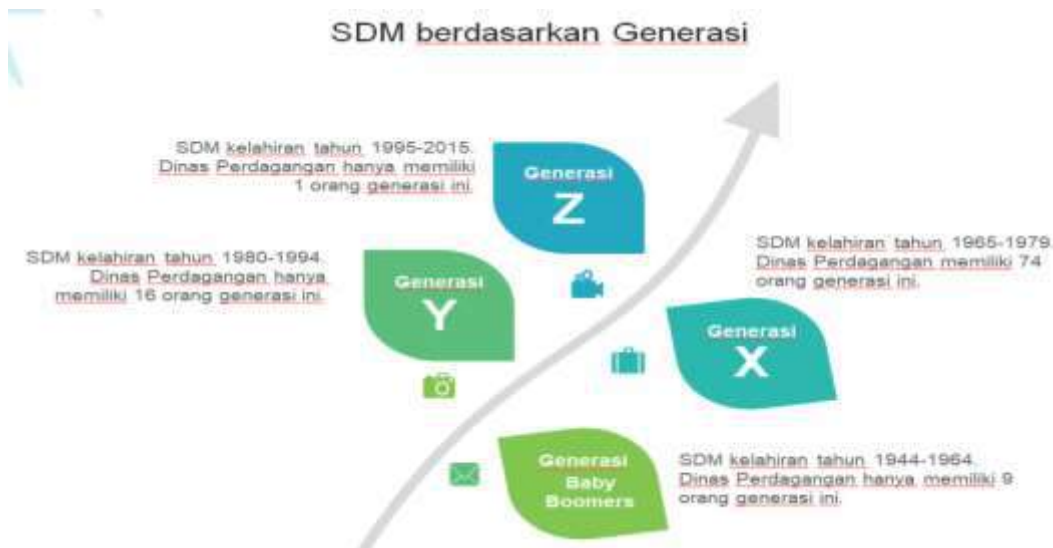


Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, 2021, diolah

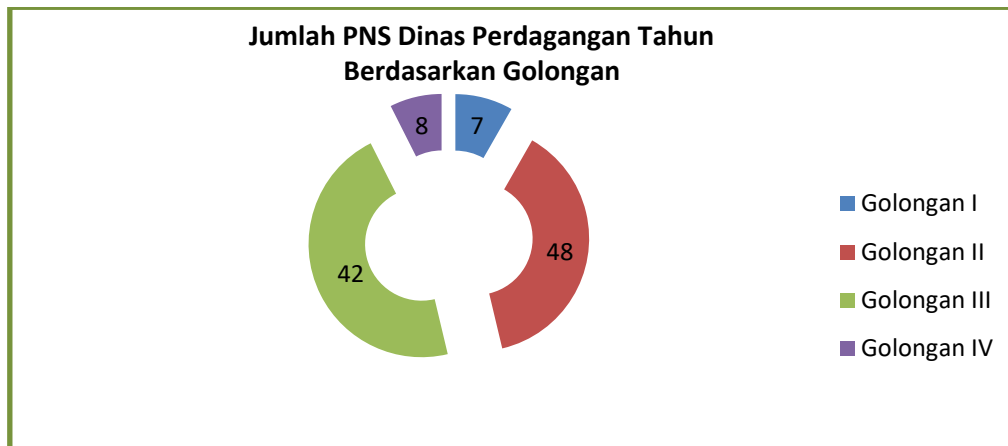
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Data kondisi SDM Dinas Perdagangan per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan basis data aplikasi SAPA ASN adalah sebagai berikut:

- a. Total pegawai adalah sejumlah 105 orang. Proporsi berdasarkan generasi terdata 1% generasi Z, 16% generasi Y, 74% generasi X dan 9 % generasi Baby Boomers. Diproyeksikan pada tahun 2024 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) Dinas Perdagangan hanya mencapai 35% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 65%.

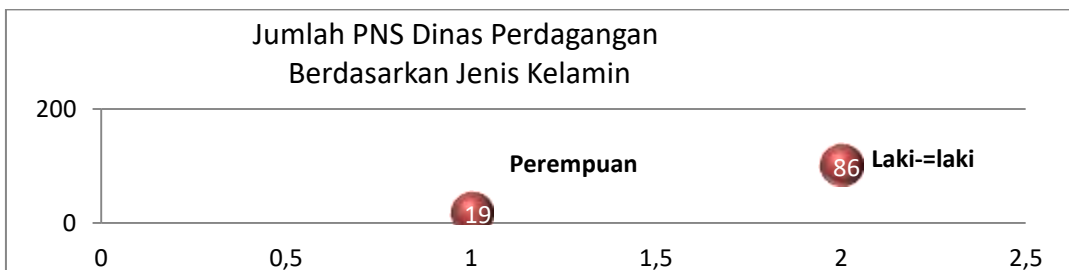


- b. Berdasarkan golongan, pegawai terbanyak adalah golongan II yaitu sejumlah 48 orang (43,8%) dan terbanyak kedua adalah pegawai golongan III sejumlah 42 orang, diikuti dengan golongan IV sejumlah 8 orang dan golongan I sejumlah 7 orang.



Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan
Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

- c. Saat ini komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan dalah 5:1 atau sejumlah 86 orang pegawai laki-laki dan 19 pegawai perempuan.



Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

- d. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sebesar 33% atau 27.076 orang dan diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sebesar 32% atau 26.611 orang.

Tabel 2.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan

JENIS PENDIDIKAN							JML	GOLONGAN				JML
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
4	7	66	1	17	10	0	121	10	40	46	9	105

Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

Kebutuhan SDM ke depan seharusnya dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap antar Perangkat Daerah, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari

internal, dapat dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

1.3. Isu Strategis



Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 86/2017). Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 2.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis.

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
<ul style="list-style-type: none"> - Situasi ekonomi terkait perang dagang - beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal - perdagangan online 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif - Standar Pelayanan pengawasan barang - Pemberitaan media terkait informasi harga - Perlindungan konsumen - Promosi perdagangan - Pengembangan Pasar Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan - Kualitas Data - Kompetensi SDM - Kemudahan pelayanan perizinan usaha - Terbatasnya daya saing produk UMKM - Maraknya rentenir - Kondisi pasar yang terkesan kumuh - Belum tertibnya usaha PKL - Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD - Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat - Pengelolaan SRG - Pengelolaan PSG

Sumber : Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

1.4. Sistematika Laporan



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;

- Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2021, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : Penutup
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pada Misi 3 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.3
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

Visi Kabupaten: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”								
NO.	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
Terwujudnya kualitas produk perdagangan			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor		Pertumbuhan Nilai Ekspor			

Sumber: RPJMD Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2021-2021, diolah

2.1.1 Visi dan Misi



Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2012-2021, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2021. Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Adapun misi ketiga yang diemban oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mencapai visi Kabupaten Bantul dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan mampu memberikan kepastian terhadap ketersediaan bahan pokok strategis dan stabilitas harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Produktivitas UMKM dan pedagang pasar yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. Selain itu sektor perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 yang dijabarkan melalui Dinas Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Tabel 2.4 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
		Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program



Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bantul. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.5 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Pengembangan ekspor	1. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
2. Peningkatan sarpras perdagangan	2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat

3. Peningkatan daya saing sdm	3. Pengembangan aspek SDM
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	4. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
5. Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	5. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	6. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTP dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	7. Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Pada tabel 2.4 disajikan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

MISI:
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Peningkatan sarpras perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
		Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
		Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
		Pengembangan ekspor	Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
		Peningkatan daya saing sdm	Pengembangan aspek SDM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Daftar program operasional Dinas Perdagangan seperti berikut ini:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
5. Program Pemberdayaan Pedagang
6. Program Penataan Pasar Rakyat

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Kabupaten Bantul. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	$(\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1) / \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1 \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	$(\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1 \times 100\%$

Tabel 2.8 Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2021	2021
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	4.61	4.76	5.33	6.33	6.62	6.95
		Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	1	2	3	4
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

2.2 Perjanjian Kinerja



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2021 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Tabel 2.9 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,25
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	4
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	6,95

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan Ekspor	%	7,25	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	114.215.740
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	183.645.120
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.247.544.056
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	6,95	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	146.692.860
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	338.284.538

Sumber : esakip.bantulkab.go.id



2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.11 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	146.692.860
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	338.284.538
		JUMLAH	484.977.398
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.247.544.056
		JUMLAH	7.247.544.056
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	114.215.740
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	183.645.120
		JUMLAH	297.860.860

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Gambar 3.1 Planning Process



Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada

tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2021, data diolah

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja



Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :






$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja
DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	6,95	1,51	21,73
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	4	4	100
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,25	29,88	412

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disimpulkan bahwa dua indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dan satu indikator sasaran berkriteria **Sangat Rendah**.



Tabel 3.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	6,95	Triwulan 1	0	0	0	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun.
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	6,95	1,51	21,73	
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	4	Triwulan 1	0	0	0	Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m ² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	4	4	100	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,25	Triwulan 1	0	0	0	Komoditas dengan nilai tertinggi adalah pakaian jadi tekstil, mebel kayu, wigs, sarung tangan kulit, dan gula kelapa. Negara tujuan ekspor antara lain Amerika Selatan, Australia, Jerman, Belanda, dan Perancis
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	7,25	29,88	412	

Tabel 3.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2021

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2021	2021			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2021 terhadap 2021 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan						
1.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</i>						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	-0.88	6,95	1,51	21,73	5.95	14,79
	Faktor Penghambat : efek domino Covid-19 di mulai dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi; penurunan konsumsi rumah tangga;adanya pembatasan aktivitas karena pandemi covid-19						
	Faktor Pendorong : Karena menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memakai kaidah statistik, inflasi yang rendah						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : meningkatkan pelayanan dan pengamanan perdagangan; meningkatkan kualitas SDM pedagang; meningkatkan sarpras perdagangan, meningkatkan investasi;						
1.2	<i>Meningkatnya kualitas pasar rakyat</i>						
1.2.1	Jumlah pasar tipe A	4	4	4	100	4.00	100
	Faktor Penghambat : Untuk mencapai pasar tipe A, banyak persyaratan yang harus terpenuhi; Banyaknya kondisi pasar yang masih rusak berat; akibat pandemi ini omzet pedagang menurun hingga 40%						
	Faktor Pendorong : Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat sangat signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat; Peningkatan SDM para pedagang Pasar ; Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat; Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI						
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan						
2.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan ekspor</i>						
2.1.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	-1.30	7.25	29.80	412	7.25	412
	Faktor Penghambat : pandemi covid-19 yang belum selesai; mahalnya bahan baku yang perlu diimpor						
	Faktor Pendorong : Masih terdapatnya permintaan produk dari luar negeri; kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah; insentif pemerintah terhadap pajak dan tenaga kerja;						

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2021	2021			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2021 terhadap 2021 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : Peningkatan pengetahuan atau informasi UKM terhadap pasar dan prosedur ekspor; peningkatan SDM dalam menghadapi persaingan ekspor; UKM diharapkan untuk lebih kreatif dan inovatif seperti menyesuaikan barang dagangannya dengan selera pasar saat ini serta ikut bersaing dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dalam berdagang seperti pemasaran lewat media online, agar kedepannya dalam berdagang agar tetap dapat eksis dibidang usahanya						

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding.

Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2021;
2. Nilai realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi pada tahun 2021;
4. Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi 5 tahun terakhir;
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 per sasaran.

Sasaran 1.
meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan

Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori.



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Sumber: esakip.bantulkab.go.id, diolah

Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “*commodity flow approach*”. Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan).

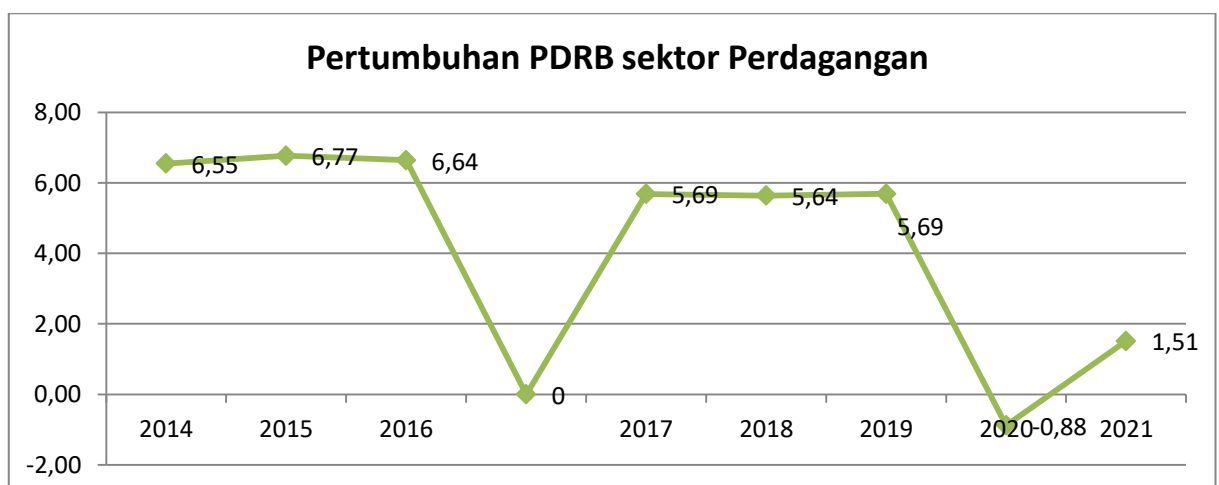
Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	-0,88	6,95	1,51	21,73	6,95	21,73

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah sebesar 6,95%, realisasi sebesar 1,51%, target tersebut tidak tercapai atau prosentase realisasi 21,73% atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar -0,88% maka capaian tahun 2021 meningkat. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 6,95%, dengan demikian capaian tahun 2021 ini menyumbangkan 21,73% dari target akhir Renstra tahun 2021.



Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2021, diolah

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi yang ditargetkan <5%)	%	5	11	220

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting adalah persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi harga yang ditargetkan adalah dibawah 5 persen). Pada tahun 2021 angka deviasi harga komoditas strategis adalah sebesar 11 persen, yang artinya perbedaan harga komoditas tahun 2021 naik sebesar 11 persen dibanding harga pada tahun 2020. Meskipun di masa pandemi, pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pendorong Inflasi 2021:

- Pandemi covid-19
- Kenaikan tinggi beberapa jenis bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.
- Bulan Puasa dan Hari Raya
- Kenaikan tarif angkutan
- Tingginya permintaan LPG

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.742.860,- dengan realisasi sebesar Rp 144.630.300 (98,59%). Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

a) Pemantauan Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe, dll. Sedangkan untuk barang penting yang dipantau ketersediaan dan harganya meliputi bahan bangunan seperti semen, triplek dan baja di toko bangunan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau Barang Kebutuhan Pokok yang di bentuk oleh Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan beranggotakan petugas pasar dan pedagang pasar (APPSI)

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha. Namun, karena tahun 2021 ini ada pandemi Covid 19 maka untuk kegiatan bersama TPID dilakukan secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan.

b) Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) Barang Kebutuhan Pokok dan Bazar UKM

Kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

Pada Tahun 2021 kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar Murah (OPM) Barang kebutuhan pokok telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan laporan sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Murah Komoditas Pangan Pokok dan Bazar Produk UKM

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok di Bulan Ramadhan 1442H yang bekerjasama dengan Bulog Divre DIY dan PT. Madubaru Madukismo Yogyakarta , Distributor Bahan Kebutuhan Pokok seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Telur dan UMKM Bantul.

Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) 1442H Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2021 melaksanakan sebanyak dua kali Operasi Pasar Murah Komoditas Pangan Pokok dan Bazar Produk UMKM di Halaman Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

2. Operasi Pasar Murah (OPM) Minyak

Kegiatan fasilitasi operasi pasar murah beras dilaksanakan sesuai permintaan dari masyarakat yang membutuhkan karena harga minyak dipasaran melebihi harga HET. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY dan Bulog Divre DIY dengan jenis komoditas minyak goreng seharga Rp. 14.000,-/liter sebanyak 420 liter.

Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Minyak ini dilaksanakan di dua dusun meliputi Dusun Bantul Karang dan Dusun Bajang, Wijirejo, Pandak

3. Operasi Pasar (OP) Komoditas Lainnya

Kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau,

Kegiatan fasilitasi OP komoditas lainnya dilakukan dalam bentuk penjualan paket sembako dengan selisih harga di pasaran yang berupa :

a. Minyak goreng 1 liter (Rp. 11.000)

b. Gula pasir 1 kg (Rp.14.000)

Setiap paket dijual dengan harga khusus Rp. 25.000,- dari harga normal Jumlah paket sebanyak 2.000 untuk dijual ke desa di Kabupaten Bantul masing-masing 500 paket

c) **Monitoring dan Evaluasi (Pemantauan Lapangan)**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pemantauan ke distributor/ pelaku usaha barang kebutuhan pokok dalam rangka menjaga

ketersediaan dan stabilitas harga maupun ke gudang Sistem Resi Gudang dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan gudang SRG.

Pemantauan ke distributor barang kebutuhan pokok dilaksanakan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti saat Idul Fitri, Idul Adha maupun Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, karena tahun 2021 ada pandemi Covid 2019 sehingga pelaksanaan kegiatannya berkurang dan mengacu protokol kesehatan.

Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibangun Bappebti dengan tujuan untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan nasional, memberikan alternatif pembiayaan bagi para petani dan UMKM di daerah untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mendapatkan harga terbaik. Gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul dibangun pada tahun 2009 seluas 600 m² dengan kapasitas penyimpanan 1.400 ton. Gudang tersebut juga dilengkapi dengan penunjang usaha bisnis berupa Dryer/ pengering dengan kapasitas 8 ton, Rice Milling Unit (RMU/ Mesin Penggilingan Gabah) dengan kapasitas 2 ton/jam, alat transportasi berupa truk dan kendaraan roda tiga. Pengelola gudang SRG sampai saat ini masih dipegang oleh KUD Tani Harjo Pandak, meskipun dalam pengelolaannya masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi. Sesuai Perbub No.14 tahun 2021 tentang adanya penambahan komoditas kedelai yang disimpan di SRG.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 :

- ❖ Sistem informasi harga barang kebutuhan pokok yang sudah ada melalui aplikasi Bapok Bantul harus terus didukung baik anggaran, SDM maupun sarprasnya sehingga bisa berfungsi optimal
- ❖ perlu adanya subsidi dari APBD untuk menjual barang kebutuhan pokok di bawah HET bagi daerah rawan kemiskinan.
- ❖ Masih banyak distributor/ pelaku usaha barang kebutuhan pokok yang belum menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya sehingga masih harus dilakukan sosialisasi

:

Pemantauan Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat



Pemantauan Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang hari besar keagamaan bersama TPID DIY



Pemantauan di distributor/ pelaku usaha barang kebutuhan pokok



Operasi Pasar Murni/ Operasi Pasar Komoditas Lainnya





Monev pengelolaan dan pemanfaatan gudang SRG Niten Bantul



Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen



Gambar 3.6 Gedung Metrologi

Indikator program ini adalah cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang. Selama tahun 2021, cakupan alat UTTP yang telah ditera/tera ulang terealisasi sebesar 7,28 persen dari target sebesar 8,5 persen, sehingga prosentase capaian indikator program ini tercapai 86 persen.

Data ini setara dengan bahwa alat UTTP yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2021 adalah sebanyak 8.615 unit.

Program Perlindungan Konsumen dan dan Pengamanan Perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 338.284.538,00,- terealisasi Rp 336.873.195,- (99,58%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang . Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang di tera/tera ulang sebanyak 8.615 unit dari 23.313 data potensi yang ada, yang merupakan akumulasi pelayanan baik di dalam kantor maupun di tempat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berada, serta yang dibawa oleh reparatir sebagai pengganti sidang tera ulang. Retribusi Tera/Tera ulang dari target Rp 93.636.000,- terealisasi sebesar Rp 94.105.900,- dengan jumlah alat UTTP yang di tera/tera ulang sebanyak 8.615 unit.

Pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib ukur baik dalam hal kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Kendaraan operasional yang mendukung mobilitas dan pelayanan prima. Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrolgian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrolgian kelas M2

3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kependagri 50/2021, maka untuk tahun 2022 selanjutnya kegiatan kemetrologian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

**Sasaran 2.
meningkatkan kualitas
pasar rakyat**

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten. Target pasar tipe A sebanyak 4 unit pada tahun 2021 tercapai 100 persen.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5	0,5	10

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Ini adalah Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat sampai tahun 2021 sebesar 0,5 persen atau prosentase capaian terhadap target sebesar 10 persen.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini,

serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan/sub kegiatan:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam penunjang sarana dan prasarana pasar rakyat, untuk tahun 2021 Dinas Perdagangan kabupaten Bantul mendapatkan anggaran untuk merehabilitasi pasar rakyat yang memiliki beberapa kerusakan pada bangunannya. Hasil keluaran dari pekerjaan rehabilitasi Pasar, guna meningkatnya kondisi pasar yang baik. Untuk capaian realisasi anggaran pekerjaan ini sbb :

No	Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase
1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar Rakyat	Rehab MCK Pasar bantul, Talang dan atap pasar Dlingo, Talang Pasar Sorobayan	Rp 149.054.005,-	Rp 146.268.000,-	Rp 2.786.005,-	98,13 %
2	Rehabilitasi Pasar Dlingo	rehab jalan masuk dan sebagian atap	Rp 165.976.672,-	Rp.162.634.000,-	Rp 3.342.672,-	97,99%
3	Rehabilitasi Pasar Gatak	rehab instalasi saluran mck, talang, tutup drainase dan tps	Rp 162.612.280,-	Rp 159.239.000,-	Rp 3.373.280,-	97,93%
4	Rehabilitasi Pasar Bantul	rehabilitasi saluran, atap dag bocor	Rp 126.725.432,-	Rp 126.197.400,-	Rp 528.032,-	99,58%

No	Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase
5	Rehabilitasi Pasar Piyungan	rehab talang pasar	Rp 195.471.175,-	Rp 190.484.000,-	Rp 4.987.175,-	97,45%
6	Rehabilitasi Pasar Barongan	rehab talang, pengecatan dan rehab listplang kantor	Rp 98.688.832,-	Rp 97.712.468,-	Rp 976.364,-	99,01%
7	Rehabilitasi Pasar Panasan	Normalisasi saluran, pintu lipat, lanscape	Rp 198.499.128,-	Rp 196.671.000,-	Rp 1.828.128,-	99,08%
8	Rehabilitasi Pasar Niten	Rehabilitasi tps	Rp 172.705.456,-	Rp 170.107.000,-	Rp 2.598.456,-	98,50%
9	Rehabilitasi Pasar Imogiri	pembangunan kios kuliner	Rp 196.256.200,-	Rp 193.182.000,-	Rp 3.074.200,-	98,43%
10	Rehabilitasi Pasar Sungapan	rehab talang, mushola, tps	Rp 190.648.880,-	Rp 188.938.000,-	Rp 1.710.880,-	99,10%
11	Rehabilitasi Pasar Semampir	rehab talang dan pagar	Rp 194.013.272,-	Rp 192.484.000,-	Rp 1.529.272,-	99,21%
12	Rehabilitasi Pasar Jejeran	rehab atap, saluran drainase dan mck	Rp 174.476.920,-	Rp 170.123.000,-	Rp 4.353.920,-	97,50%

No	Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase
13	Rehabilitasi Pasar Pundong	rehab mck, mushola dan saluran drainase	Rp 171.583.992,-	Rp 167.154.000,-	Rp 4.429.992,-	97,42 %
14	Rehabilitasi Pasar Angkruksari	rehab mck, tutup drainase dan pasang penutup tampias air hujan	Rp 152.519.104,-	Rp 148.415.000,-	Rp 4.104.104,-	97,31 %
15	Rehabilitasi Pasar Gumulan dan Pasar Sorobayan	Gumulan (pemasangan pintu kantor, pintu tps), Sorobayan (rehab tps dan sebagian atap)	Rp 199.620.592,-	Rp 195.315.000,-	Rp 4.305.592,-	97,84 %
16	Rehabilitasi Pasar Mangiran dan Pasar Koripan	mangiran (rehab saluran , pngecatan sbagian los dan sumur resapan),koripan (pembuatan loket , rehab talang dan tps)	Rp 190.648.880,-	Rp 184.990.000,-	Rp 5.658.880,-	97,03 %

Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar Rakyat Gatak



Rehabilitasi Pasar Bantul



Rehabilitasi Pasar Piyungan



Rehabilitasi Pasar Niten



Rehabilitasi Pasar Imogiri



1. Rehabilitasi Pasar Sungapan



Rehabilitasi Pasar Pundong



Rehabilitasi Pasar Angkrusari



Rehabilitasi Pasar Gumulan Dan Pasar Sorobayan



Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur penunjang untuk Pasar Seni Gabusan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan beberapa pekerjaan tersebut juga sudah berdampak pada kelangsungan operasional PSG, salah satunya beberapa pelaku usaha banyak yang sudah masuk untuk kembali menghidupkan Pasar Seni Gabusan. Selain itu, beberapa event yang bersifat harian, mingguan hingga bulanan juga sudah mulai masuk dan menyemarakkan Pasar Seni Gabusan. Harapannya pembenahan – pembenahan diberbagai sektor ini dapat berjalan secara berkala, sehingga kegiatan revitalisasi dan pengembangan PSG dapat terus berjalan berkesinambungan.

Selanjutnya keberhasilan dari kegiatan monitoring juga dapat dirasakan dari mulai meningkatnya omset para PKL di masa pandemi ini. Hal tersebut tak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan yang terus memberikan sosialisasi pentingnya penerapan prokes untuk para pelaku usaha PKL maupun di Pusat Kuliner, karena dengan kepatuhan terhadap prokes dapat menekan penyebaran covid-19 sehingga para konsumen juga merasa aman dan nyaman. Selain itu, dengan kepatuhan dan ketertiban bersama juga berdampak pada kelonggaran aturan pemerintah sehingga dapat kembali berjualan dengan normal dan omset para pedagang pun sedikit demi sedikit juga kembali normal.

Penerangan Jalan dan Elektrikal



Pemeliharaan PSG



Monev PKL dan Pusat Kuliner



Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Secara keseluruhan kegiatan fasilitasi pengelola sarana distribusi perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terlaksananya kegiatan pelatihan pengelolaan pasar, Pendampingan APPSI, Pemeliharaan Baliho, Publikasi Iklan media cetak dan yang paling membanggakan adalah terlaksananya audit surveillance SNI Pasar Imogiri dengan hasil Mutu I kualitas I.

Pelatihan Pengelola Pasar

Dinas Perdagangan sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat. Di Kabupaten Bantul terdapat 32 pasar. Pasar Rakyat terbagi dalam 4 Tipe pasar dengan jumlah pedagang kurang lebih 12.000 pedagang.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa stigma masyarakat terhadap Pasar Rakyat saat ini lebih banyak yang bersifat negatif dari pada positif. Pedagang yang tidak tertata, lingkungan pasar yang kotor dan sarana yang tidak memadai adalah penilaian yang paling sering kita dengar tentang pasar.

Penilaian masyarakat tentang kondisi pasar sebagaimana tersebut di atas, menjadi salah satu sebab semakin berkurangnya pengunjung dan transaksi di pasar. Selain kondisi fisik yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, aspek manajemen internal pengelolaan pasar juga belum dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain;

- Keluhan kerusakan fasilitas fisik belum dapat direspon dengan cepat dikarenakan keterbatasan anggaran
- Aspek penataan dan pembinaan pedagang belum dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan pengelola pasar difokuskan untuk melaksanakan penarikan retribusi
- Jumlah SDM pengelola pasar masih sangat kurang
- Pengelolaan retribusi masih dilakukan secara manual

Saat ini retribusi Pasar Rakyat masih dikelola secara manual yaitu dengan cara petugas menarik retribusi setiap hari secara langsung kepada pedagang los dan sebulan sekali untuk pedagang kios, kemudian melakukan pencatatan dan menyetorkan ke kas daerah. Dengan model penarikan retribusi yang masih dikelola secara manual baik penarikan maupun pencatatannya, banyak potensi masalah yang muncul seperti:

- a. Pengelolaan Retribusi Pasar kurang efektif dan kurang efisien
- b. Penatausahaan retribusi pasar kurang akuntabel
- c. Penyajian laporan kurang cepat.

- d. Membutuhkan lebih banyak SDM pemungut retribusi.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas baik permasalahan kualitas lingkungan pasar maupun permasalahan internal pasar, salah satu cara yang mendesak untuk dilaksanakan adalah kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan pasar. Pelatihan Pengelola Pasar dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2021 di Aula Bank Bantul dengan jumlah peserta 100 orang. Peserta pelatihan pengelola adalah pengelola pasar, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas dana bergulir, petugas pemungut retribusi dan staf bidang pengembangan pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Untuk capaian realisasi anggaran pekerjaan ini sbb :

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	Rp 20.614.000	Rp 17.774.000,-	Rp 2.840.000,-	86.22 %

Pendampingan APPSI

Kegiatan Pendampingan APPSI bertujuan untuk mereview atau menyampaikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan kepada Pengurus APPSI dan Pengelola Pasar. Dimana didalam terdapat aturan pemanfaatan Los dan Kios di Pasar Rakyat. Pengurus APPSI diharapkan menjadi pelopor juga pelapor dalam penegakan peraturan daerah di Pasar Rakyat. Dalam hal ini Pengurus APPSI menjadi contoh dalam menerapkan aturan pengelolaan pasar rakyat untuk kemudian menyampaikan peraturan tersebut kepada pedagang di masing masing pasar . Dalam hal pelapor pengurus APPSI harus aktif menyampaikan penyimpangan penyimpangan yang terjadi di Pasar Rakyat kepada petugas yang berwenang. Untuk capaian realisasi anggaran pekerjaan ini sbb :

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	Rp 7.150.000,-	Rp 6.650.000,-	Rp 500.000,-	93 %

Survailance SNI Pasar Rakyat

Survailance SNI Pasar Rakyat dilakukan untuk memastikan konsistensi pengelola pasar terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan:

- inspeksi sarana dsin prasarana pasar; dan
- asesmen pada saat proses jual beli di pasar dan audit sistem manajemen pengelolaan pasar

Kunjungan survailen dilakukan paling sedikit 1 kali dalam periode sertifikasi, selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. Audit Surveillance dilakukan selama 2 hari yaitu 8 dan 9 November 2021 di Pasar Imogiri.

. Untuk capaian realisasi anggaran pekerjaan ini sbb :

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	Rp 40.846.000,-	Rp 34.431.400,-	Rp 6.414.600,-	84.29%

Promosi Pasar

Promosi pasar bertujuan sebagai sarana untuk memperkenalkan/mempromosikan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bantul. Dengan adanya promosi pasar diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat dan menarik perhatian pengunjung/masyarakat agar mau berkunjung dan berbelanja di pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bantul. Bentuk promosi pasar yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berupa pemeliharaan baliho di Pasar Piyungan, Pasar Imogiri, Pasar Mangiran, dan Pasar Turi. Pemeliharaan baliho berupa penguatan rangka atas dan perbaikannya, penggantian konten promosi pasar.

Untuk capaian realisasi anggaran pekerjaan ini sbb :

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	Rp 30.650.000,-	Rp 30.369.525,-	Rp 280.475,-	99,08%

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, karena tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada Pengelola Pasar, Pedagang Pasar, Pengunjung Pasar dalam bentuk bimbingan, pelatihan, monitoring, dan promosi pasar.

Dalam kondisi ditengah masa pandemi corona ini, seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti kegiatan promosi pasar sangat dibatasi. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran daerah mengalami perubahan bahkan sampai dihilangkan, salah satunya kegiatan promosi pasar dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan di ganti menjadi promosi pasar dalam bentuk publikasi baliho di beberapa pasar. Selain itu kegiatan pelatihan pedagang juga diganti menjadi pelatihan pengelolaan pasar.

Secara umum, permasalahan yang dialami pada kegiatan ini yaitu dalam penyusunan materi karena harus melibatkan narasumber yang kompeten dibidangnya. Selain itu, kendala yang dialami adalah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin pada waktu kegiatan pelatihan pengelolaan pasar dan pendampingan APPSI. Permasalahan lain pada sub kegiatan fasilitasi pengelola sarana distribusi perdagangan adalah penyusunan materi iklan publikasi media cetak di Radar membutuhkan waktu yang lama dikarenakan

harus survey langsung ke beberapa pasar yang mempunyai produk produk unggulan yang membutuhkan promosi pasar. Pelaksanaan Audit Survailance SNI Pasar Imogiri terlaksana dengan baik namun terdapat beberapa koreksi dari Tim Auditor seperti belum tersedianya pengolahan sampah (3 R) di Pasar Imogiri, belum adanya sarana prasarana untuk disabilitas, dan tidak adanya pengatur suhu pada mesin pendingin (freezer) untuk pedagang ikan dan ayam.

Setiap kegiatan pasti akan muncul suatu permasalahan ataupun kendala baik teknis maupun non teknis yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. seperti halnya dalam kegiatan pelatihan pengelolaan pasar dan pendampingan APPSI harus benar benar memperhatikan peserta dan panitia untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam penunjukan narasumber butuh konsultasi dengan berbagai pihak untuk menunjuk narasumber yang profesional. Dalam penyusunan materi iklan publikasi media cetak melalui radar lebih sering berkoordinasi dengan penyedia jasa dan pengelola pasar agar mendapatkan materi iklan yang berkualitas. Dalam menindaklanjuti temuan TIM Auditor SNI Pasar Imogiri Pengelola Pasar Imogiri bersama sama dengan APPSI Pasar imogiri segera mengadakan kerja bakti untuk membuat sarana prasarana disabilitas seperti membuat kloset khusus disabilitas beserta membuat jalan yang bisa digunakan juga oleh penyandang disabilitas, Mengadakan sosialisai terkait pemilahan sampah, Mensosialisasikan kepada pedagang ikan dan ayam untuk melengkapi mesin pendingin (freezer) dengan penagtur suhu. Suhu untuk mengawetkan ikan maupun ayam minimal -18°C . Seluruh tindak lanjut temuan TIM Auditor Survailance SNI Pasar Imogiri menggunakan dana dari APPSI Pasar Imogiri.



Pendampingan APPSI



Kegiatan Survailance SNI Pasar Imogiri

Kegiatan Pelatihan Pengelola Pasar



Pemeliharaan Baliho



Publikasi melalui media cetak foto ditambahi foto media cetak yg vaksin



**Sasaran 3.
Meningkatnya
pertumbuhan ekspor**

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah sebesar 7,25%, realisasi sebesar 29,88%..

Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor	-1,3	7.25	29,88	412	7,25	412

Sumber: e sakip.bantulkab.go.id

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2021 mencapai US\$ 158,9 juta naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$122,3 juta. Komoditi unggulan Kabupaten Bantul adalah : Mebel kayu (Sewon, Bambanglipuro, Srandakan, Dlingo, Pleret, Kasihan, Piyungan), Keramik/ Gerabah (Kasihan). Sedangkan komoditi andalan berupa : Kerajinan Kulit (Manding), Kerajinan Kayu (Pajangan dan Sewon), Tatah sungging (Kasihan dan Imogiri), dan Batik (Imogiri, Sewon, Pandak).

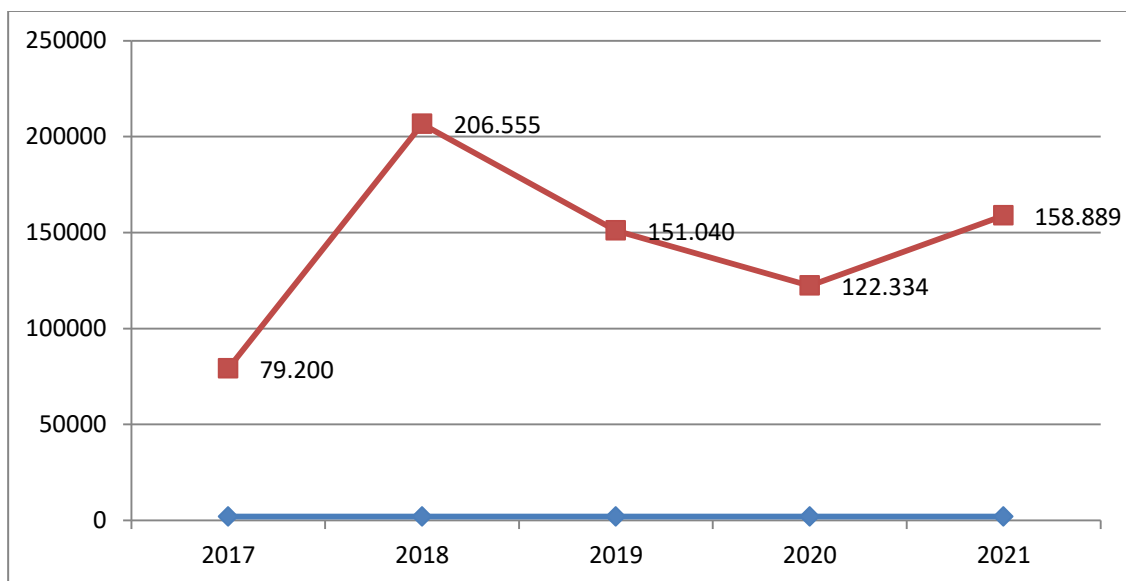
Begitu melimpahnya komoditi unggulan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul maupun untuk pelaku usaha, terlebih lagi program-program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengakomodir keinginan Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Bantul untuk bisa lebih berkembang dan meningkatkan ekspor komoditas perdagangan daerah.

Upaya memacu ekspor menghadapi tantangan luar biasa karena ekonomi global yang melambat, namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor antara lain:

1. Mempermudah izin ekspor untuk produk UMKM seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menggratiskan biaya sertifikasi agar harga produk UMKM Indonesia dapat bersaing pada pasar global
2. Memberikan insentif pajak ekspor bagi pelaku UMKM. Adapun, insentif lain yang diperlukan adalah penurunan biaya transportasi, perlindungan hukum untuk pasar luar negeri
3. Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kualitas produk

4. UMKM harus bertransformasi ke arah ekonomi hijau. Produk hijau saat ini sedang digandrungi pasar global. Di mana-mana permintaannya adalah produk hijau, dapat dimulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan
5. Marketplace sangat potensial untuk menjadi shortcut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menjangkau pasar yang lebih luas. pelaku UMKM harus memiliki keunikan khusus agar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Mereka yang memiliki keunikan produk serta kapasitas dan kontinuitas produksi akan memenangkan persaingan. Semua pelaku UMKM harus segera bertransformasi ke arah digital.

Gambar 3.9. Perkembangan Ekspor 2017-2021 (dalam ribu US\$)



Sumber: Dinas Perdagangan, 2015-2021, diolah

Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang tertarget, karena di pameran tentunya pengunjung yang datang merupakan orang-orang yang tertarik dengan tema pameran yang diadakan dan berniat untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa di pameran tersebut.

Pameran diikuti banyak pelaku bisnis atau usaha. Melalui pameran tersebut, bisa sekaligus menjangkau informasi tentang pesaing, seperti harga produk, produk unggulan, peralatan yang digunakan, atau sekedar mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis mereka.

Selain memfasilitasi pameran, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga melibatkan 60 orang peserta UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor. Narasumber pelatihan tersebut adalah narasumber yang berkompeten dalam tata kelola ekspor, antara lain dari KPPBC

Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, KPP Pratama Bantul, GPEI DPD DIY, Alltrans Cargowork Asia, dan Ketua ASMINDO DIY.

Dari beberapa potensi yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul berharap bisa nyembadani arah kebijakan era globalisasi seraya mengoptimalkan semua potensi di Kabupaten Bantul yang ada dengan:

- a. Rekrutmen pengrajin untuk di adakan pembinaan
- b. Fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha
- c. Pengembangan pemasaran
- d. Pendistribusian informasi melalui online tentang kegiatan yang ada di Dinas sehingga dapat mengoptimalkan kuantitas pelaku usaha yg terjaring pada kegiatan Dinas.





3.3 Akuntabilitas Anggaran



Anggaran murni DPA TA 2021 sebesar Rp 19.258.610.640,- kemudian melalui DPA Perubahan TA 2021, anggaran Dinas Perdagangan menjadi Rp21.543.666.779,- dengan realisasi sebesar Rp 20.524.113.119,- atau sebesar 95,27%.

Alokasi anggaran tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	484.977.398	481.503.495	99,28
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	7.247.544.056	7.127.681.145	98,35
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	297.860.860	196.114.880	65,84
Jumlah Belanja Program Prioritas		8.033.382.314	7.805.299.520	97,16
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		10.337.914.618	9.576.807.550	92,64
Belanja Pendukung		3.175.369.847	3.142.006.049	98,95
Total Belanja		21.543.666.779	20.524.113.119	95,27

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama (termasuk belanja honorarium 172 orang PHL) sebesar Rp8.033.382.314,- terealisasi sebesar 97,16% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp3.175.369.847,- terealisasi sebesar 98,95% dari total belanja, serta belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp10.337.914.618,- dan terealisasi sebesar 92,64%.

Anggaran untuk program/kegiatan utama sebenarnya sangat minimalis karena dalam belanja untuk program utama tersebut terdapat belanja honorarium PHL 172 orang sebesar Rp4.000.000.000,- , sehingga untuk program utama hanya tersedia anggaran Rp4.033.382.314,-.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 95,27% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **efektif**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,16% (kategori efektif), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,95% (kategori efektif).

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan IKU pertumbuhan PDRB kategori perdagangan sebesar 99,28%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan ekspor sebesar 65,84%.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	6,95	1,51	21,73	484.977.398	481.503.495	99,28
2	Jumlah pasar tipe A	4	4	100	7.247.544.056	7.127.681.145	98,35
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7,25	29,88	412	297.860.860	196.114.880	65,84

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

3.4 Efisiensi Sumber Daya



Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	484.977.398	481.503.495	3.473.903	0,72
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	7.247.544.056	7.127.681.145	119.862.911	1,65
3	Pertumbuhan ekspor	297.860.860	196.114.880	101.745.980	34,16
Jumlah		8.033.382.314	7.805.299.520	225.082.794	2,80
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		10.337.914.618	9.576.807.550	7.127.681.145	1,09
Belanja Pendukung		3.175.369.847	3.142.006.049	33.363.798	1,05
Total Belanja		21.543.666.779	20.524.113.119	1.019.553.660	4,73

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	100	98,35	1,65

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Perdagangan sebesar 4,73% atau setara dengan Rp1.019.553.660,-. Silpa tersebut merupakan sisa anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 760.000.000, tidak terlaksananya Sewa Market Place Alibaba dan Operasional untuk Pemasaran Produk UMKM dikarenakan tidak ada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan, tidak bisa dibayarkan anggaran diawal/mendahului untuk pelaksanaan kegiatan, dan waktu pengadaan terbatas, serta sisa pengadaan barang/jasa dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi pasar. Untuk sasaran yang masuk kategori efisien dalam penggunaan sumber daya hanya sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat dengan tingkat efisien sebesar 1,65%.

**Apa yang dilakukan
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
dalam rangka Penanganan Dampak Covid-19?**



Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di Pasar Rakyat dan Taman Kuliner melalui penganggaran APBD dan bantuan CSR

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga telah menyediakan sarana protokol kesehatan di Pasar Rakyat dan Taman Kuliner. Dinas Perdagangan juga banyak menerima bantuan dari CSR terkait penanganan pandemic covid-19 ini. Bantuan tersebut berupa wastafel portable, masker, hand sanitizer, bilik desinfektan, sabun cuci tangan dan sebagainya yang berasal dari Kementerian Perdagangan, BPD DIY, RS Respira, PMI DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Bank BRI, Universitas Alma Ata, REMAIS, PDAM, dan ACT.



Dalam rangka pelayanan perlindungan konsumen dimasa pandemi, UPTD Metrologi Kab. Bantul tetap melaksanakan kegiatan berupa tera dan tera ulang, baik dikantor kemudian pasar maupun juga pelaku usaha dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penularan Covid-19



Monitoring dan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat, Taman Kuliner, Angkringan, dan Toko Swalayan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga telah melakukan monitoring dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat dan toko swalayan yang tersebar di 17 kecamatan, serta 4 taman kuliner yang bekerja sama dengan Satpol PP, Polres Bantul, dan beberapa instansi terkait. Dari hasil monev ini disimpulkan bahwa kurangnya kedisiplinan

masyarakat akan protokol kesehatan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak) sehingga perlunya pengawasan dan pemantauan secara berkala serta adanya sanksi keras bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kegiatan Operasi Pasar dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau pada masa pandemi ini.



Koordinasi dan Kolaborasi dengan stakeholders terkait

Selama masa pandemi ini, Dinas Perdagangan Kabupaten telah melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai stakeholders seperti Tim Gugus Tugas Bidang Ekonomi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Gugus Tugas Penanganan (Covid-19) dibentuk untuk mengatasi dampak penularan Covid-19 dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi khususnya di bidang ekonomi.

Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Ekonomi mengidentifikasi hal krusial terkait ekonomi yaitu Ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja di sektor industri, tempat wisata, hotel, restoran dan desa wisata, pelayanan jasa dan perdagangan , ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat, akses operasional (penutupan lokal), edukasi protokol kesehatan, terutama penyemprotan disinfektan, kebijakan daerah (penutupan tempat usaha yang perlu diatur dengan cermat, pengendalian barang dan alur distribusi serta jaminan kebutuhan dasar).

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan juga telah menggelar vaksinasi massal yang menyasar pasar rakyat. Terdapat lebih dari 8.000 orang pedagang yang telah mengikuti vaksinasi.



Vaksinasi Massal di Pasar Rakyat

BAB IV. PENUTUP



1.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul belum dapat memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Faktor paling dominan adalah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian dunia termasuk Indonesia dan berimbas pada daerah-daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bantul. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi satu IKU telah tercapai sesuai dengan target, namun ada satu IKU yang jauh dibawah target, Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 tidak dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 The Next Steps

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berikut permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan pencapaian target indikator kinerja:

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Pengaruh musim terutama berpengaruh pada komoditi pertanian, perkebunan dan hasil-hasil sumber daya alam lainnya yang tidak tahan lama, sehingga pada musim panen harga cenderung turun dan pada musim tanam harga mengalami kenaikan. Pengaruh musim ini pada gilirannya mempengaruhi kelancaran pasokan serta fluktuasi harga	<ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan Operasi Pasar- Memperbaiki rantai pasok- Mengeluarkan kebijakan harga- perlu adanya subsidi dari APBD untuk menjual barang kebutuhan pokok di bawah HET bagi daerah rawan kemiskinan.
2	Rendahnya penegakkan hukum atas pelanggaran kebijakan/aturan yang telah dibuat	<ul style="list-style-type: none">- Kejelasan sanksi ringan sampai dengan berat- Pengendalian dan pengawasan terhadap penegakan hukum
3	SDM pengelola yang tidak memahami manajemen pasar Rakyat, pengelola pasar rakyat tidak memiliki visi dan misi mengenai pengembangan pasar rakyat maupun pengelolaannya secara baik;	<ul style="list-style-type: none">- Pengelola Pasar diwajibkan untuk mengikuti diklat manajemen pengelolaan pasar rakyat
4	Hasil retribusi pasar tidak ada dialokasikan untuk pemeliharaan pasar rakyat	<ul style="list-style-type: none">- Berkoordinasi dengan BKAD terkait mekanisme alokasi PAD
5	Pengelolaan sampah dan limbah pasar yang kurang baik sehingga mengakibatkan pasar menjadi kotor, serta TPA Piyungan yang seringkali berhenti operasional sehingga banyak sampah yang menumpuk di pasar	<ul style="list-style-type: none">- Berkoordinasi dengan DLH- Membuat TPS di tiap pasar- Menyediakan sarpras dan SDM untuk mengelola sampah pasar

No.	Permasalahan	Solusi
6	Belum optimalnya pelayanan tera/tera ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan juga masyarakat untuk membudayakan tertib ukur 2. Pelayanan kemetrolgian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab 3. Melaksanakan jemput bola/pengambilan alat UTTP 4. Updating data wajib tera 5. Sosialisasi 6. Pengawasan kemetrolgian 7. Peningkatan kapasitas untuk SDM 8. Penyempurnaan gedung metrologi 9. Pengadaan alat standar kemetrolgian
7	Banyaknya pertumbuhan ekspor kecil-menengah di Kabupaten Bantul yang belum terdata.	Melakukan pendataan, dapat bekerjasama dengan universitas.
8	Belum adanya data yang valid untuk usaha bidang Perdagangan selain Toko Swalayan dan Usaha Pergudangan	pendataan usaha bidang perdagangan selain toko swalayan dan usaha pergudangan (misal usaha toko kelontong dll)
9	Kurang <i>update</i> -nya data toko swalayan tidak berizin yang ada di Kabupaten Bantul	<p>Dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh baik untuk toko swalayan yang berizin maupun yang tidak berizin</p> <p>Dilakukan kajian atas pendirian Toko Swalayan yang ada di Kabupaten Bantul secara komprehensif</p>
10	Belum adanya monitoring Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang usaha perdagangan	Dilakukan monitoring SIUP dengan cara meminta laporan tahunan kepada semua pemegang SIUP dan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMP) Kabupaten Bantul
11	Sistem informasi harga barang kebutuhan belum berfungsi optimal, serta tidak tersedianya jaringan internet di sebagian besar pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan aplikasi BAPOK BANTUL yang telah ada - Kemitraan dengan kominfo dalam penyediaan jaringan internet - Peningkatan kapasitas admin sibapok

No.	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> untuk 5 pasar sampel (Pasar Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri, Pijenan) - Monev kegiatan sibapok di 5 pasar sampel
12	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada konsumen - Memberikan sanksi bagi pedagang yang menjual bahan berbahaya
13	Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	Revitalisasi PSG : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Sarpras ✓ kemitraan/program kolaboratif ✓ Pengelolaan pedagang ✓ Peningkatan kapasitas pengelolaan PSG (aspek produk, harga produk, aspek promosi)
14	Sasaran mutu kegiatan pelatihan pedagang/UKM belum tercapai maksimal	Merumuskan metode pelatihan yang efektif
15	Omzet pedagang pasar tidak mengalami peningkatan secara signifikan karena kurangnya daya saing	<ul style="list-style-type: none"> - regulasi perubahan jam operasi pasar - promosi pasar antara lain melalui undian hadiah dan promo/diskon secara berkala - mendorong pedagang pasar untuk melakukan inovasi teknik berjualan , misalnya via online
7	Tiga puluh delapan persen (32 pasar) penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penguasaan kepemilikan tanah kas desa dan Sultan Ground untuk pasar rakyat dan kawasan PKL. - Sewa tanah kas desa untuk pasar rakyat
8	pemanfaatan los pasar bantul lt.2 belum optimal	Promosi dan Pemasaran Pasar Bantul Lantai 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN

Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon (0274)367338 Faks (0274)367504
Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id
website: perdagangan.bantulkab.go.id